

Determinan Kemiskinan di Jawa Tengah: Studi Empiris Pengaruh Upah Minimum, IPM, dan Pengangguran (2021-2023)

Putri Juliyanti¹, Iwan Fahri Cahyadi²

IAIN Kudus^{1,2}

Email: putrijlynt03@gmail.com¹, iwanfahri@iainkudus.ac.id²

Abstract

This research aims to determine the effect of the minimum wage, the Human Development Index (HDI), and the unemployment rate on poverty in Central Java in 2021-2023. This research is library research with a quantitative approach and uses secondary data. The sample for this research was 42 data, which were obtained through the official website of the Central Java Central Statistics Agency for the 2021-2023 period. This data was processed using the EViews 12 application. Based on research carried out using the T-test, the results were that the minimum wage had a result of $-0.815586 < 1.68595$ with a probability value of $0.4198 > 0.05$. It could be concluded that the minimum wage had no effect significant impact on poverty. The Human Development Index (HDI) has a result of $0.406242 < 1.68595$ with a probability value of $0.6868 > 0.05$, so the Human Development Index (HDI) has no significant effect on poverty. The unemployment rate has a result of $3.884305 > 1.68595$ with a probability value of $0.0004 < 0.05$, so it can be concluded that the unemployment rate partially has a significant effect on poverty. However, overall, the three variables together can explain variations in the poverty rate.

Keywords: Poverty; Minimum Wage; Human Development Index (HDI); Unemployment Rate.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2021-2023. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Sampel penelitian ini sebanyak 42 data, yang diperoleh melalui situs resmi Badan Pusat Statistik Jawa Tengah Periode 2021-2023. Data tersebut diolah menggunakan aplikasi EViews 12. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan uji T diperoleh hasil, Upah Minimum memiliki hasil $-0,815586 < 1,68595$ dengan nilai prob $0,4198 > 0,05$ dapat disimpulkan bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki hasil $0,406242 < 1,68595$ dengan nilai prob $0,6868 > 0,05$ maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Tingkat pengangguran memiliki hasil $3,884305 > 1,68595$ dengan nilai prob $0,0004 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pengangguran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Namun, secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut bersama-sama dapat menjelaskan variasi dalam tingkat kemiskinan.

Kata Kunci: Kemiskinan; Upah Minimum; Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Tingkat Pengangguran.

PENDAHULUAN

Fenomena kemiskinan telah menjadi isu sentral dalam agenda pembangunan global, menarik perhatian berbagai pemangku kepentingan di tingkat internasional. Banyak sekali pertanyaan, diskusi, dan penelitian yang dilakukan oleh para ahli, lembaga internasional, serta pemerintah di berbagai negara dalam upaya menemukan solusi yang tepat untuk mengentaskan kemiskinan secara global. Apalagi masalah kemiskinan yang menempati posisi utama dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), menandakan betapa pentingnya permasalahan ini untuk segera diselesaikan agar setiap bentuk dan aspek kemiskinan, di mana pun terjadi, dapat diatasi dan dituntaskan (Muhammad Farhan Dakhilullah 2022). Kemiskinan adalah suatu kondisi nyata yang dihadapi masyarakat, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan. Situasi ini muncul ketika individu, keluarga, atau kelompok masyarakat tertentu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar (Pinontoan 2020).

Keadaan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah hampir sama dengan tingkat nasional, dengan persentase penduduk miskin yang masih tergolong tinggi dibandingkan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa (Handayani 2024). Berdasarkan data, Provinsi Jawa Tengah yang menduduki peringkat ketiga dalam hal jumlah penduduk di Indonesia, masih memiliki angka kemiskinan sebesar 10,77% pada tahun 2023 (Nurfarizki et al. 2024).

Analisis data menunjukkan adanya tren penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa tahun terakhir, dari 11,79% pada tahun 2021 menjadi 10,77% pada tahun 2023. Pada Maret 2023, angka kemiskinan di Jawa Tengah tercatat sebesar 10,77%. Target penurunan angka kemiskinan di Jawa Tengah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023, yakni sebesar 6,48% hingga 7,48%, namun pada tahun 2023 belum tercapai (Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2019). Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di provinsi ini pada Maret 2023 masih berada di atas 10%, mengindikasikan adanya gap signifikan antara target yang ditetapkan dengan kondisi riil di lapangan. Upaya untuk mencapai target ini terus terhambat oleh permasalahan seperti ketimpangan pendapatan dan rendahnya upah di sektor informal. Menurut data BPS Jawa Tengah tahun 2023, rata-rata usia masyarakat miskin adalah 50,01 tahun. Dari segi pekerjaan, sekitar 31,25% bekerja pada sektor pertanian, 11,26% pada industri, 10,19% tidak memiliki pekerjaan, dan sisanya 47,30% bekerja pada sektor lain. Terkait tingkat pendidikan, 33,38% kepala keluarga miskin merupakan lulusan SD, 18,06% tidak mengenyam pendidikan formal, 16,67% tamat SMP, dan 24,10% merupakan lulusan

SLTA. Selain itu, perempuan sebagai kepala keluarga tercatat sebanyak 12,90% dalam kelompok rumah tangga miskin (Prasetyo et al. 2023).

Tingginya angka kemiskinan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah tingkat upah minimum, tingkat pengangguran, dan Indeks Pembangunan Manusia. Upah merupakan bentuk yang diterima oleh seorang tenaga kerja dalam bentuk sejumlah uang yang disampaikan kepadanya (Mankiw 2018). Menurut Muhammad Farhan Dakhilullah dalam penelitiannya, upah minimum tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Muhammad Farhan Dakhilullah 2022), sedangkan menurut Wafirrotullaela dan Anton Bawono upah minimum berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan (Wafirrotullaela and Bawono 2023).

Kemudian faktor yang mempengaruhi yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), menurut UNDP, IPM merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana pembangunan manusia telah berhasil dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk. IPM ini mengukur capaian pembangunan manusia dari tiga aspek utama, yaitu umur panjang dan kesehatan yang baik, akses terhadap pengetahuan, serta ketersediaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak (Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik 2024). Menurut penelitian yang diteliti oleh Ghazy Faden Faadihilah, IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan (Faadihilah 2023).

Salah satu faktor determinan kemiskinan yang signifikan adalah tingginya tingkat pengangguran di suatu wilayah, pengangguran adalah kondisi ketika Individu yang memiliki kapasitas dan tekad untuk bekerja tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang sejalan dengan kompetensi serta minat mereka dalam jangka waktu tertentu (Suharnanik 2023). Tingkat pengangguran menurut penelitian yang diteliti oleh Kesha Rizki Maulina berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan (Maulina 2023). Temuan ini menunjukkan adanya korelasi positif yang kuat antara tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan, mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pengangguran secara signifikan berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan., dimana peningkatan angka pengangguran berdampak pada menurunnya produktivitas penduduk. Penurunan produktivitas tersebut menyebabkan ketidakmampuan penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ketidakmampuan ini pada akhirnya memperburuk kondisi pemenuhan kebutuhan hidup. Situasi tersebut secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Sedangkan menurut Nuraeni Handayani berbanding terbalik yakni tidak terdapat kontribusi antara tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah (Handayani 2024).

Provinsi Jawa Tengah menyajikan gambaran kompleks mengenai masalah kemiskinan. Penetapan upah minimum yang dianggap rendah

dibandingkan dengan kenaikan biaya hidup menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kemiskinan. Selain itu, rendahnya IPM berimplikasi pada terbatasnya kesempatan kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada tingginya angka pengangguran. Data statistik menunjukkan Provinsi Jawa Tengah berada di urutan kedua dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Indonesia, menjadikan wilayah ini sebagai objek studi yang relevan untuk memahami dinamika kemiskinan secara lebih mendalam.

Berdasarkan kajian pendahuluan, penelitian ini menetapkan upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran terbuka sebagai variabel bebas. Variabel-variabel tersebut dipilih karena data yang diperlukan dapat diperoleh secara lengkap dan akurat dari Badan Pusat Statistik. Selain itu, pembatasan jumlah variabel ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang lebih terfokus dan memudahkan interpretasi hasil penelitian. Penelitian ini akan difokuskan pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan untuk menguji pengaruh tingkat upah minimum, tingkat pengangguran, dan IPM terhadap kemiskinan di wilayah tersebut. Fokus penelitian ini juga menjadi pembeda dari penelitian-penelitian sebelumnya.

KAJIAN LITERATUR

Teori Kemiskinan

Dalam kajian kemiskinan, terdapat dua teori besar yang menjadi landasan dalam menganalisis fenomena ini, yaitu paradigma neoliberal dan demokrasi sosial. Paradigma *Neo-Liberal* menurut Michael Belgrave, kemiskinan adalah masalah pribadi yang timbul dari kekurangan atau kesalahan individu. Artinya, seseorang miskin karena kurangnya kemampuan, motivasi, atau karena membuat pilihan hidup yang kurang tepat. Untuk mengatasi kemiskinan, Belgrave menyarankan agar kita membiarkan pasar bekerja secara bebas. Dengan kata lain, kita harus membiarkan kekuatan pasar menentukan harga, produksi, dan distribusi barang dan jasa tanpa banyak campur tangan pemerintah (Belgrave 2012). Menurut paradigma demokrasi sosial, kemiskinan adalah cerminan dari masalah struktural dalam masyarakat, seperti ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya. Alih-alih menyalahkan individu miskin, pendekatan ini mengkritik sistem yang menciptakan kondisi tersebut. Kaum sosial demokrat tidak anti-kapitalisme, tetapi mereka berpendapat bahwa pasar bebas perlu diatur oleh negara untuk memastikan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi semua.

Kemiskinan

Kemiskinan dapat digambarkan sebagai kondisi hidup di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki kemampuan ekonomi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar (Fitriana 2022). Badan Pusat

Statistik (BPS) menggunakan tiga indikator utama untuk mengukur tingkat kemiskinan, yaitu: *Head Count Index* (HCI-P0): Persentase penduduk dengan tingkat pengeluaran yang berada di bawah ambang garis kemiskinan, (*Poverty Gap Index*-P1): Ukuran rata-rata defisit pengeluaran penduduk miskin dibandingkan dengan garis kemiskinan, dan (*Poverty Severity Index*-P2): Indikator yang mencerminkan tingkat keparahan kemiskinan dan ketidaksetaraan di antara penduduk miskin (Badan Pusat Statistik 2021).

Upah Minimum

Upah minimum adalah batas bawah yang ditentukan oleh pemerintah sebagai bentuk perlindungan terhadap pekerja, memastikan mereka mendapatkan penghasilan yang layak dan tidak dieksploitasi oleh pengusaha. Nominal upah minimum ditetapkan oleh pemerintah daerah dan mencakup upah pokok serta tunjangan tetap. Upah minimum berperan sebagai pelindung sosial untuk melindungi daya beli pekerja (Telaumbanua 2019). Sonny Sumarsono menyatakan indikator upah terdiri dari, menurut lamanya kerja, menurut lamanya dinas, menurut kebutuhan, dan menurut banyaknya produk (Sumarsono 2003).

Dalam pandangan Islam, upah (*ujrah*) merupakan hak yang melekat pada setiap pekerja sebagai jenis imbalan atas kontribusi yang telah diberikan. Konsep upah ini berakar dari akad Ijarah, yaitu perjanjian untuk mendapatkan manfaat tertentu dengan memberikan imbalan. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa akad Ijarah hal ini diizinkan dalam Islam.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikembangkan oleh UNDP bertujuan untuk mengukur seberapa jauh suatu negara berhasil meningkatkan kualitas hidup penduduknya. IPM ini berfokus pada tiga aspek utama: kesehatan dan umur panjang, tingkat pendidikan, serta standar hidup yang layak (Novitasari 2023). Program Pembangunan PBB (UNDP) telah menetapkan tiga indikator utama dalam mengukur Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai tolok ukur kualitas hidup suatu negara, yaitu, umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak (Angeline 2024).

Tingkat Pengangguran

Pengangguran merupakan suatu kondisi di mana individu yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk bekerja tidak dapat memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya atau bekerja dalam durasi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tingkat pengangguran di suatu daerah dapat dinilai melalui dua metode, yaitu pendekatan angkatan kerja (*Labour force approach*) dan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (*Labour utilization approach*) (Hartati 2021).

Dalam Islam, bekerja tidak semata-mata sekedar mencari nafkah, tetapi juga merupakan ibadah. Setiap aktivitas yang dilakukan dengan niat

yang benar dan sesuai dengan syariat Islam akan memperoleh pahala dari Allah SWT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode kajian pustaka atau *library research*. Data yang digunakan mencakup informasi mengenai upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan di seluruh wilayah administratif kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Sampel penelitian difokuskan pada kabupaten/kota yang memiliki tingkat kemiskinan lebih tinggi dari rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Kebumen, Wonosobo, Brebes, Pemalang, Purbalingga, Banjarnegara, Rembang, Sragen, Banyumas, Klaten, Demak, Grobogan, Blora, dan Purworejo. Wilayah penelitian mencakup seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah, dengan perhatian khusus pada daerah yang tingkat kemiskinannya melebihi rata-rata provinsi dan dalam periode 2021-2023. Penelitian ini menganalisis variabel upah minimum, IPM, tingkat pengangguran, dan tingkat kemiskinan dengan menggunakan perangkat lunak EViews 12 untuk pengolahan data.

PEMBAHASAN

Pemilihan Model Regresi

Setelah dilakukan serangkaian uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier, diputuskan bahwa model efek acak (random effect) adalah yang paling tepat untuk penelitian ini. Uji Chow menunjukkan model efek tetap lebih sesuai dengan probabilitas yang sangat kecil (0,0000). Namun, uji Hausman menghasilkan probabilitas 0,3069 ($> 0,05$), dan uji LM menunjukkan nilai Breusch-Pagan yang sangat kecil (0,0001). Hasil ini mengindikasikan adanya variasi antar individu dalam data panel, sehingga model efek acak lebih cocok digunakan.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Berdasarkan pengolahan data menggunakan EViews, diperoleh hasil nilai *probability Jarque-Bera* dengan nilai 0,672957, yang secara signifikan melebihi ambang batas 0,05. Hal tersebut mengindikasikan bahwa data yang dianalisis memiliki pola distribusi yang sesuai dengan distribusi normal, yang berarti data tersebut tidak menunjukkan penyimpangan yang signifikan dari kurva normal dalam hal simetri dan keruncingan. Oleh karena itu, asumsi normalitas dalam penelitian ini dapat dianggap terpenuhi.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan uji Glejser, nilai probabilitas untuk seluruh variabel yaitu 0,1122, artinya melebihi tingkat

signifikansi 5% (0,05). Hasil uji menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas dalam data. Ini mengindikasikan bahwa asumsi homoskedastisitas terpenuhi dalam model regresi ini.

Uji Multikolinearitas

Tabel 1
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Centered VIF
X1	1,186040
X2	1,537504
X3	1,362806

Sumber : Hasil Olah Data EViews (2024)

Berdasarkan hasil analisis multikolinearitas yang disajikan pada Tabel 1, nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk seluruh variabel independen (upah minimum, IPM, dan tingkat pengangguran) berada di bawah ambang batas 10 yaitu variabel upah minimum (X1) senilai 1,186040, variabel IPM (X2) senilai 1,537504 dan variabel tingkat pengangguran (X3) senilai 1,362806. Temuan ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas yang signifikan dalam model regresi yang digunakan.

Uji Autokorelasi

Nilai *Obs*R-Squared* yang diperoleh dari pengolahan EViews adalah 4,955690 dengan probabilitas 0,0839. Nilai probabilitas 0,0839 yang lebih besar dari 0,05 mengindikasikan bahwa tidak terdapat pelanggaran terhadap asumsi tidak adanya autokorelasi dalam model regresi.

Uji Signifikansi

Koefisien Determinasi

Analisis regresi linier berganda menghasilkan nilai koefisien determinasi (*R-squared*) yang diperoleh dari EViews, sebesar 0,332786. Angka ini mengindikasikan bahwa sekitar 33,28% dari total variasi tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah dapat dijelaskan oleh variasi bersama dari variabel upah minimum, IPM, dan tingkat pengangguran. Dengan kata lain, ketiga variabel independen tersebut secara kolektif memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam menjelaskan fluktuasi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 66,72% variasi tingkat kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar model regresi yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Uji F

Tabel 2
Hasil Uji F Model Random Effect

R-squared	0,332786
Adjusted R-squared	0,280112
F-statistic	6,317759
Prob(F-statistic)	0,001389

Sumber: Hasil Olah Data EViews (2024)

Uji F berdasarkan Model Random Effect dengan EViews yang diterapkan untuk menguji pengaruh bersama variabel independen (upah minimum, indeks pembangunan manusia, dan tingkat pengangguran) terhadap variabel dependen (tingkat kemiskinan) menghasilkan nilai probabilitas sebesar 0,001389, jauh di bawah tingkat signifikansi 5%. Temuan ini memberikan bukti kuat bahwa ketiga variabel independen tersebut berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah secara bersama-sama. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh simultan diterima, sementara hipotesis null yang menyatakan tidak ada pengaruh simultan ditolak.

Uji T

Tabel 3
Hasil Uji T Model Random Effect

Variabel	Koefisien	Nilai Probabilitas
X1	-3,95E-05	0,4198
X2	1,420648	0,6868
X3	22,51322	0,0004

Sumber: Hasil Olah Data EViews (2024)

Analisis Upah Minimum, IPM, dan Tingkat Pengangguran pada Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah 2021-2023

1. Upah Minimum (X1)

Mengacu pada temuan penelitian, terbukti bahwa upah minimum memiliki nilai probabilitas sebesar 0.4198, yang mana angka ini lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi (*alpha*) sebesar 0.05 atau 5%. Selain itu, nilai koefisien yang diperoleh adalah -3.95E-05. Ini mengindikasikan bahwa secara parsial tidak ditemukan pengaruh yang signifikan antara upah minimum terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2021 hingga 2023.

Upah minimum, meskipun terdengar seperti solusi langsung untuk mengurangi kemiskinan, seringkali tidak memberikan dampak yang signifikan. Alasannya, aturan upah minimum ini hanya berlaku bagi pekerja yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar atau sektor formal. Padahal, sebagian besar orang miskin bekerja di sektor

informal, seperti pedagang kecil, buruh tani, atau pekerja serabutan, yang pendapatannya tidak tetap dan seringkali jauh di bawah standar upah minimum. Selain itu, jika upah minimum dinaikkan terlalu tinggi, ada risiko perusahaan-perusahaan akan mengurangi jumlah karyawan untuk menekan biaya. Atau, mereka bisa saja menaikkan harga barang dan jasa yang mereka jual. Akibatnya, kelompok masyarakat yang paling miskin justru akan semakin kesulitan karena harga kebutuhan pokok menjadi lebih mahal. Masalah kemiskinan itu sendiri sangat kompleks dan tidak bisa diatasi hanya dengan menaikkan upah minimum.

2. Indeks Pembangunan Manusia (X2)

Mengacu pada temuan penelitian, ditemukan bahwa IPM memiliki nilai probabilitas sebesar 0.6868, yang mana angka ini lebih besar dibandingkan dengan tingkat signifikansi (*alpha*) sebesar 0.05 atau 5%. Selain itu, nilai koefisien yang diperoleh adalah 1,420648. Tidak ditemukan bukti empiris yang kuat untuk mendukung adanya pengaruh IPM terhadap kemiskinan di Jawa Tengah dalam periode 2021 hingga 2023.

IPM di kabupaten/kota yang diteliti mengalami perbaikan. Hal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat. Akan tetapi, jika ditelusuri lebih lanjut, masih terdapat ketimpangan dalam indikator capaian IPM. Jika dilihat dari indikator kesehatan, terdapat peningkatan yang signifikan pada angka harapan hidup di Jawa Tengah selama periode 2021-2023, namun data Susenas 2023 menunjukkan adanya disparitas yang cukup besar dalam hal akses terhadap sanitasi dan air bersih yang layak. Persentase rumah tangga di Jawa Tengah yang belum memiliki jamban sendiri sebesar 10,60%, kemudian sebesar 19,01% belum menggunakan sumber air minum bersih, dan masih terdapat rumah tangga yang memiliki lantai tanah sebesar 8,30%. Kemudian jika dilihat dari indikator pendidikan, terdapat peningkatan pada Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) di Jawa Tengah pada tahun 2021-2023, meskipun pendidikan di Jawa Tengah mengalami peningkatan akan tetapi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 8,77%, capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Jawa Tengah masih tertinggal pada angka 8,01%. Di antara tiga dimensi yang membentuk indikator pembangunan manusia, salah satu dimensi yang menunjukkan standar hidup layak diukur melalui pengeluaran per kapita mengalami kemunduran dalam hal ketimpangan. Ketimpangan pada dimensi ini cenderung memburuk, dengan disparitas yang terus meningkat sepanjang tahun 2021 hingga 2022. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan yang terjadi belum merata di seluruh lapisan masyarakat,

sehingga IPM tidak secara langsung mampu mengatasi masalah ketimpangan dan kemiskinan di wilayah tersebut.

3. Tingkat Pengangguran (X3)

Mengacu pada temuan penelitian, ditemukan bahwa tingkat pengangguran memiliki nilai probabilitas sebesar 0.0004, yang mana angka ini lebih kecil dibandingkan dengan tingkat signifikansi (*alpha*) sebesar 0.05 atau 5%. Selain itu, nilai koefisien yang diperoleh adalah 22,51322. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan tingkat pengangguran berkontribusi secara signifikan pada peningkatan tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dalam periode 2021 hingga 2023. Dengan kata lain, ketika tingkat pengangguran mengalami peningkatan, hal tersebut akan berkontribusi pada peningkatan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Sebaliknya, apabila terjadi penurunan dalam tingkat pengangguran, sehingga akan menurunkan tingkat kemiskinan. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa dinamika kemiskinan memiliki kaitan erat dengan kondisi kemiskinan, sehingga perubahan pada salah satu indikator tersebut akan mempengaruhi indikator lainnya secara signifikan.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengkaji bagaimana upah minimum, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah selama periode 2021-2023. Analisis regresi data panel dengan model efek acak digunakan untuk menguji hubungan ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hanya tingkat pengangguran yang secara signifikan mempengaruhi kemiskinan, sementara upah minimum dan IPM tidak memiliki pengaruh signifikan secara individual. Namun, secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut bersama-sama dapat menjelaskan variasi dalam tingkat kemiskinan. Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diajukan. Pertama, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu lebih fokus pada pengembangan sektor informal mengingat definisi pengangguran terbuka yang mencakup individu yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, atau belum mulai bekerja setelah mendapatkan pekerjaan. Kedua, kebijakan penetapan upah minimum perlu dipertahankan dan bahkan ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan hidup layak (KHL) untuk melindungi daya beli pekerja dan mencegah terjadinya kemiskinan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi tingkat kemiskinan di Jawa Tengah, seperti tingkat pendidikan, akses terhadap layanan kesehatan, dan infrastruktur. Selain itu, perluasan periode penelitian dan penggunaan metode analisis yang

lebih beragam, seperti analisis kualitatif, dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika kemiskinan di wilayah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Angeline, Paulina Rika Elly. (2024). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Statistik Indonesia Tahun 2021*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Belgrave, Michael. (2012). *Social Policy History: Forty Years on, Forty Years Back*. Treasury.
- Direktorat Analisis dan Pengembangan Statistik. (2024). *Indeks Pembangunan Manusia 2023*. Badan Pusat Statistik.
- Faadihilah, Ghazy Faden. (2023). Analisis Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi* 9 (5).
- Fitriana, Nur. (2022). Pengaruh Upah Minimum Regional, Indeks Pembangunan Manusia dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Indonesia. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Handayani, Nuraeni. (2024). Pengaruh IPM, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2019. *Diponegoro Journal of Economics* 11 (1): 26-36. <https://doi.org/10.14710/djoe.32658>.
- Hartati, Yuniar Sri. (2021). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 12 (1).
- Mankiw, N. Georgy. (2018). *Pengantar Teori Ekonomi Makro*. Salemba Empat.
- Maulina, Kesha Rizki. (2023). Pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka, Pertumbuhan Ekonomi, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Aceh Periode 2017-2021 Ditinjau dalam Perspektif Ekonomi Islam. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Muhammad Farhan Dakhilullah. (2022). Pengaruh Upah Minimum dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Pulau Jawa Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan* 1 (1): 60-75. <https://doi.org/10.58192/wawasan.v1i1.239>.
- Novitasari, Halla. (2023). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tenaga Kerja dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2017-2021 dengan Distribusi Zakat sebagai Variabel Moderating. *Thesis (Other)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga Tahun 2023.
- Nurfariyki, Ardhia Iqbal, Bagas Setiawan, Fais Ridho Nugroho, Wahyu Rizky, and Mohammad Rizal Wildan Azka. (2024). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Lama Sekolah terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah. (2019). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023*.

- Pinontoan, Marien. (2020). *Konsep Dasar Kemiskinan dan Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Prasetyo, Senen Budi, Arif Sofianto, Lita Febrian, Okki Chandra Ambarwati, Wahyu Widodo, and Lilam Kadarin Nuriyanto. (2023). Rekonstruksi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Jawa Tengah: Bukan Sekedar Bantuan Sosial. *Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Badan Riset dan Inovasi Daerah* 1 (1).
- Suharnanik. (2023). *Buku Ajar Masalah Ketenagakerjaan dan Pengangguran*. 1st ed. Surabaya: UWKS PRESS.
- Sumarsono, Sonny. (2003). *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Telaumbanua, Dalinama. (2019). *Hukum Ketenagakerjaan*. Deepublish.
- Wafirrotullaela, and Anton Bawono. (2023). Pengaruh Upah Minimum Regional dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kab./Kota di Jawa Tengah TAHUN 2021). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 8 (2).